

Sinergi Lintas Sektor dan Politik Anggaran dalam Mendukung Pembangunan Sumber Daya Maritim





Dadang Solihin

Doktor Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran dan MA *in Economics* dari University of Colorado at Denver, USA ini adalah *Senior Strategic Planner* pada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Pernah menjadi Direktur selama 7 tahun di Bappenas, Sarjana Ekonomi Pembangunan FE Unpar ini sudah menghasilkan beberapa buku tentang Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, dll.

Dadang Solihin adalah peserta terbaik Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXIX tahun 2010 LAN-RI Jakarta dan peserta terbaik Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX tahun 2013 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI yang dinyatakan lulus Dengan Pujian serta dianugerahi Penghargaan Wibawa Seroja Nugraha.

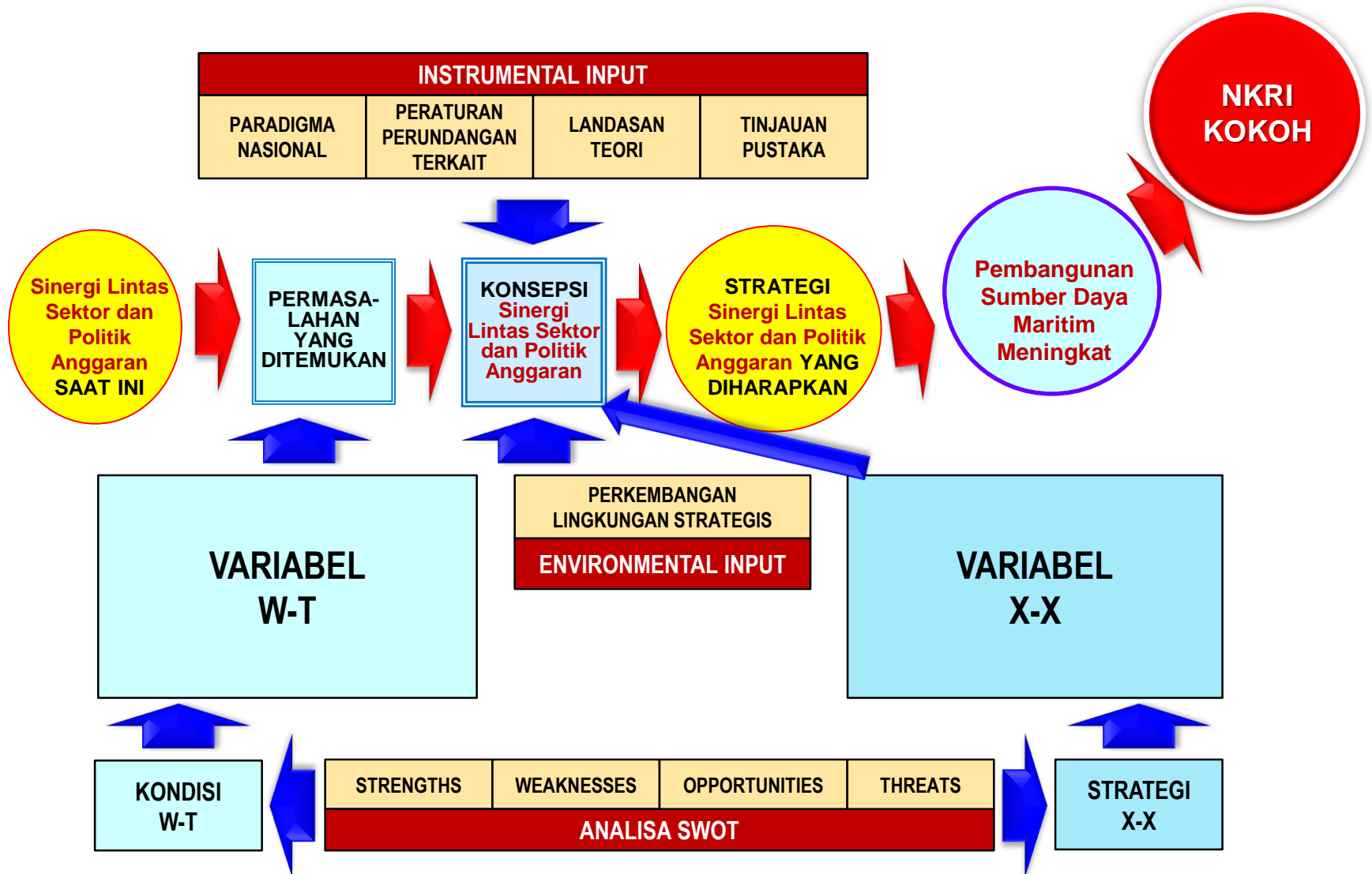
Karya-karyanya tersebar di berbagai media terutama di media on-line. Silahkan email dadangsol@gmail.com HP 08129322202 web: <http://dadang-solihin.blogspot.com>

Materi

- Alur Pikir
- *What is Synergy?*
- Apa itu Politik Anggaran?
- Permasalahan Kemaritiman
- Sistem Manajemen Nasional (Sismennas)
- Kerangka Kelembagaan
- Arah Kebijakan dan Strategi Percepatan Pembangunan Kelautan
- RPJMN 2015-2019
- **Simulasi Penyusunan KSU dengan Analisa SWOT**



ALUR PIKIR Sinergi Lintas Sektor dan Politik Anggaran dalam Mendukung Pembangunan Sumber Daya Maritim



What is Synergy?

Web Images Videos News More Search tools

About 51,600,000 results (0.30 seconds)

syn·er·gy

/ˈsɪnərjē/

noun

the interaction or cooperation of two or more organizations, substances, or other agents to produce a combined effect greater than the sum of their separate effects.
"the synergy between artist and record company"

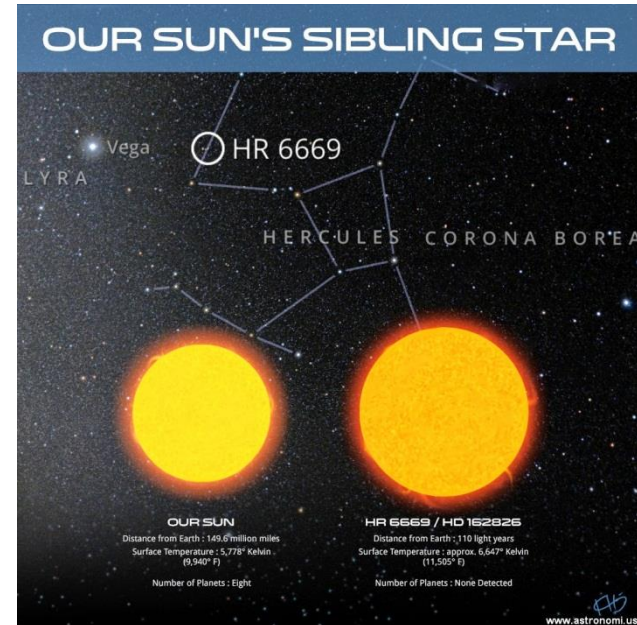
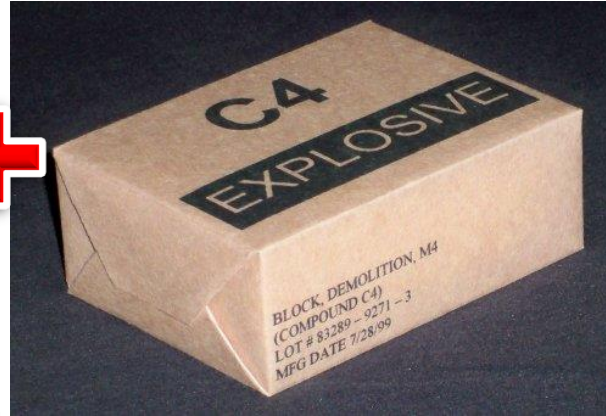
synonyms: cooperative interaction, cooperation, combined effort, give and take
"there's no synergy between the two, so no costs are saved"

SYNERGY

$$1 + 1 = 3$$



What is Synergy?



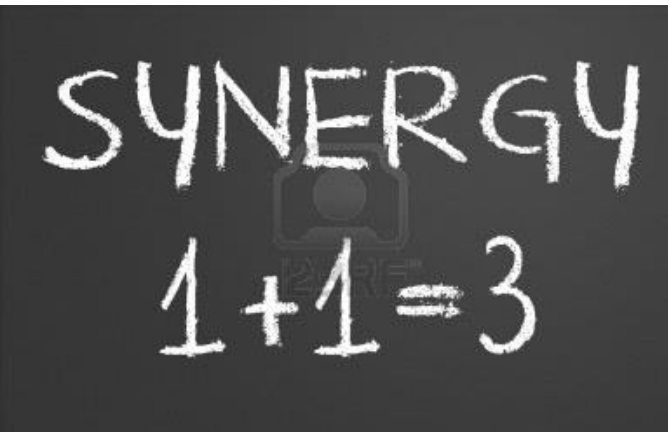
co·or·di·na·tion

/kō,ōrdn'āSH(ə)n/

noun

1. the organization of the different elements of a complex body or activity so as to enable them to work together effectively.
"both countries agreed to intensify efforts at economic policy coordination"

What is Synergy?



SINERGI

**Lintas
Sektor**



**Politik
Anggaran**



**Bang S.D
Maritim**

Apa itu Politik Anggaran?

Politik Anggaran adalah penetapan berbagai kebijakan tentang proses penganggaran.

Politik Anggaran adalah proses saling mempengaruhi di antara berbagai pihak yang berkepentingan dalam menentukan skala prioritas pembangunan akibat terbatasnya sumber dana publik yang tersedia.

Politik Anggaran adalah proses mempengaruhi kebijakan alokasi anggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggaran.

Pihak Mana saja yang Terlibat dalam Penganggaran?



Kerangka Pendanaan

- Kerangka pendanaan merupakan bagian dari rencana tindak pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.
- Kerangka pendanaan meliputi kebijakan pada belanja pemerintah pusat, transfer daerah serta kebijakan pembiayaan pembangunan.
- Pencapaian sasaran tersebut dilakukan melalui skala prioritas yang berdasarkan strategi pembangunan nasional.
- Meskipun investasi pemerintah relatif kecil namun sangat penting dalam penyediaan infrastruktur dasar dan pelayanan dasar lainnya.
- Peran investasi masyarakat merupakan sumber utama dalam pendanaan pembangunan.
- Untuk itu sangat diperlukan sinergi antara kerangka pendanaan dan kerangka regulasi.

Kebijakan Pembiayaan Pembangunan

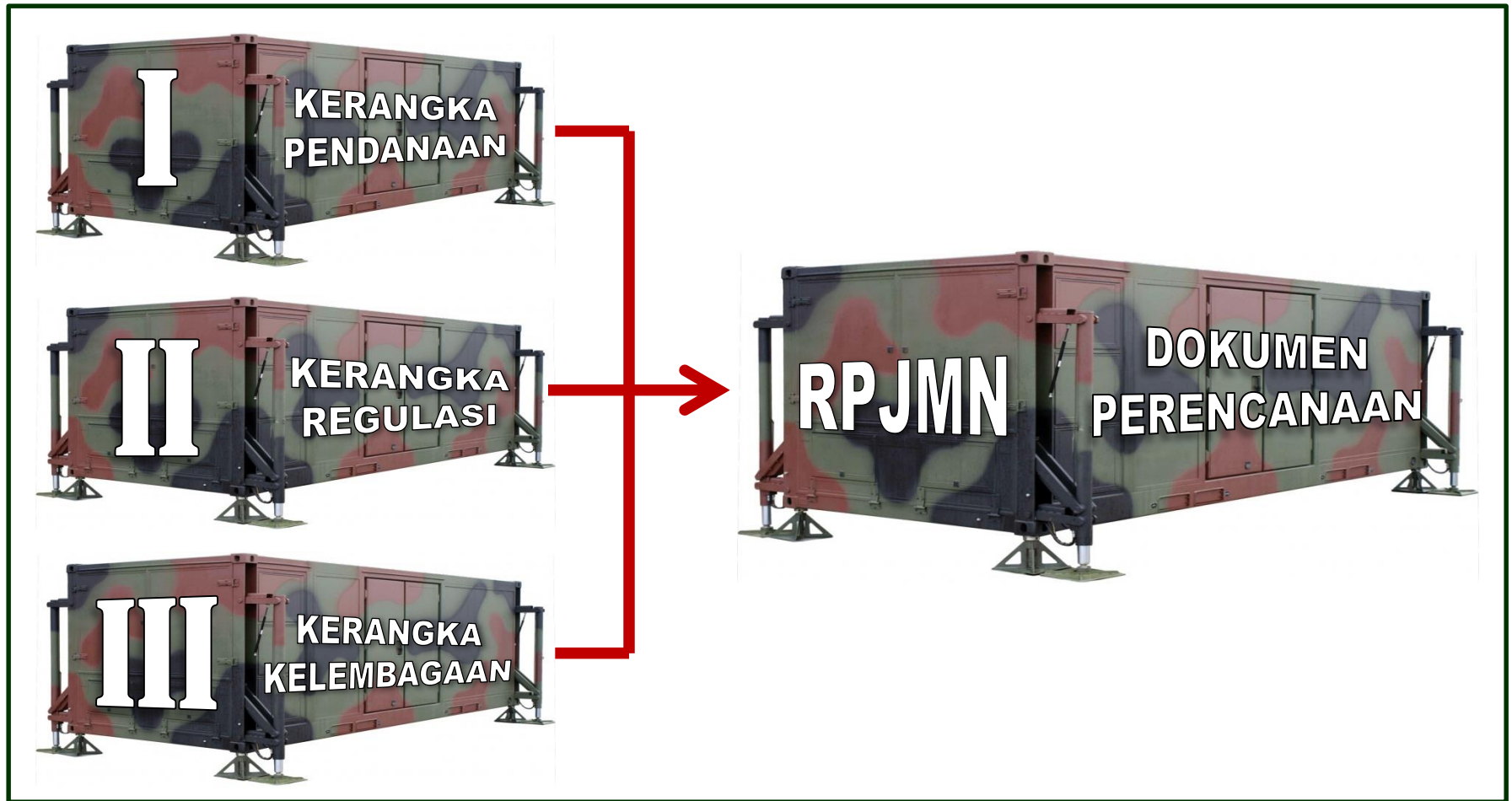
- Pembiayaan pembangunan dapat berasal dari Pemerintah maupun Swasta.
- Pembiayaan dari Pemerintah yang dialokasikan melalui APBN:
 - Penerimaan Pajak dan Hibah,
 - Pinjaman Luar Negeri,
 - Pinjaman Dalam Negeri, dan
 - Penerbitan Surat Berharga Negara (SBN)/Surat Berharga Syariah Negara (SBSN),
- Kontribusi swasta terhadap pembiayaan pembangunan:
 - Pembiayaan oleh Perbankan,
 - Lembaga Keuangan Non Bank,
 - Pasar Modal (Saham dan Obligasi),
 - Dana Luar Negeri, dan lainnya.

Sinergi Perencanaan Penganggaran

- Sinergi Perencanaan Penganggaran menghasilkan *outcome* dan *impact* yang lebih besar → Pertumbuhan Ekonomi, Penurunan Kemiskinan, Pengurangan Pengangguran, dll



What Instrument are Needed for Synergy?





Permasalahan Kemaritiman



“Untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, kuat, makmur, dan damai yang merupakan *Nation Building* bagi negara Indonesia maka NEGARA DAPAT MENJADI KUAT JIKA DAPAT MENGUASAI LAUTAN”.

SOEKARNO, dikutip
oleh Menko Kemaritiman
Indroyono Soesilo

- **Persatuan Indonesia dan integrasi ekonomi yang utuh dari negeri kepulauan ini hanya dapat dicapai melalui reformasi logistik maritim yang menyeluruh,**

TANPA REFORMASI TERSEBUT, INDONESIA HANYALAH KUMPULAN PULAU-PULAU, BUKAN NEGARA KEPULAUAN.

R.J. LINO
Direktur Utama PT Pelindo II



www.indonesia-tourism.com

Masalah Perikanan

1. Usaha perikanan cenderung stagnan

- Didominasi oleh nelayan kecil dan pembudidaya ikan tradisional, yaitu kapal motor dan kapal penangkap ikan di bawah 5 GT.
- Kepemilikan lahan usaha budidaya masih rata-rata di bawah 1 ha.

2. Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) sulit menerapkan prinsip-prinsip perikanan yang bertanggungjawab (*responsible fisheries*)

- Belum dilengkapi struktur dan mekanisme pengelolaan
- Belum memiliki tata kelola perikanan yang baik (*good fisheries management*),

3. Maraknya ***Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing***, yang dilakukan oleh kapal perikanan Indonesia (KII) maupun oleh kapal perikanan asing (KIA).

Masalah Perikanan

4. Industri pengolahan perikanan masih didominasi oleh industri pengolahan skala mikro dan kecil.

- Komposisi industri/unit pengolahan ikan (UPI) skala mikro mencapai hampir 95% dari industri pengolahan perikanan yang ada (sekitar 60 ribu unit UPI).
- Produk perikanan pada umumnya masih dipasarkan dalam bentuk primer, berupa penggaraman/pengeringan, pemindangan, dan pengasapan/pemanggangan.
- Komoditas rumput laut, yang merupakan salah satu produk terbesar budidaya, mayoritas dijual dalam bentuk bahan baku olahan yang dikeringkan.
- Lokus industri pengolahan perikanan masih terkonsentrasi di Jawa sementara sumber daya perikanan berada di luar Jawa.
- Kurang memadainya sarana dan prasarana terkait sistem logistik perikanan, termasuk transportasi, sehingga distribusi produk perikanan kurang efisien.

Masalah Tata Kelola Laut

1. Penataan ruang laut masih lemah.

- Baru 5 provinsi, 7 kabupaten dan 5 kota yang telah menetapkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui peraturan daerah.

2. Pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar belum optimal.

- Keterbatasan sarana prasarana dasar, berupa listrik, air, telekomunikasi,
- Keterbatasan sarana prasarana pengembangan ekonomi
- kurang memadainya jumlah kapal dan rute penghubung antarpulau kecil dan antara pulau kecil dengan pulau besar.
- Pendataan, pemetaan, penamaan pulau-pulau kecil serta pelaporan ke PBB harus diselesaikan sampai dengan tahun 2017.

Masalah Tata Kelola Laut

3. Kurangnya pengelolaan kawasan konservasi secara efektif.
 - Baru sekitar 3,6 juta ha dari 20 juta ha yang telah dikelola secara efektif.
4. Kurangnya upaya peningkatan ketahanan wilayah pesisir terhadap erosi, abrasi, dan pencemaran.
5. Belum optimalnya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelautan.
6. Belum terbangunnya secara utuh kelembagaan pendidikan dan pelatihan Kelautan.
7. Kurang berperannya inovasi dan pengembangan IPTEK tepat guna dalam pembangunan kelautan dan perikanan.

Masalah Transportasi Laut

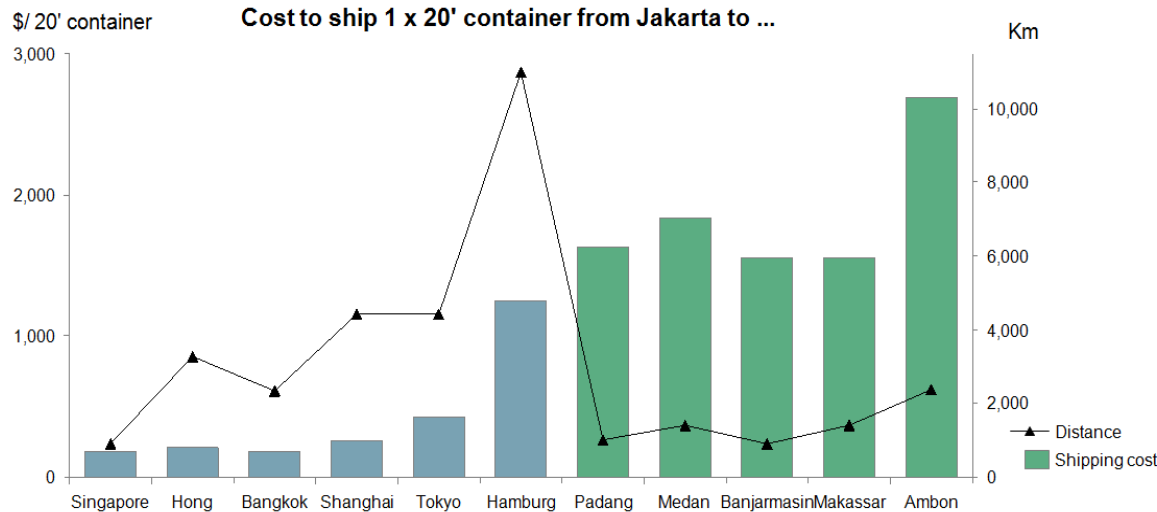
1. Keterpurukan peran armada pelayaran nasional.

- Sekitar 50% dari angkutan kargo domestik sudah berusia lebih dari 25 tahun,
- Biaya ekonomi yang tinggi menyebabkan turunnya minat pengguna transportasi laut,
- Kurangnya fasilitas prasarana bongkar muat di pelabuhan.

2. Tidak efisiennya pengangkutan barang yang diangkut terutama untuk angkutan laut ke Indonesia bagian timur.

- Angkutan laut dari Pulau Jawa ke Papua terisi penuh, namun kembali dalam keadaan kosong.
- Salah satu penyebabnya adalah karena wilayah di timur Indonesia tersebut sangat langka akan pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi.
- Hal ini menyebabkan biaya logistik yang dibebankan kepada komoditi menjadi tinggi.

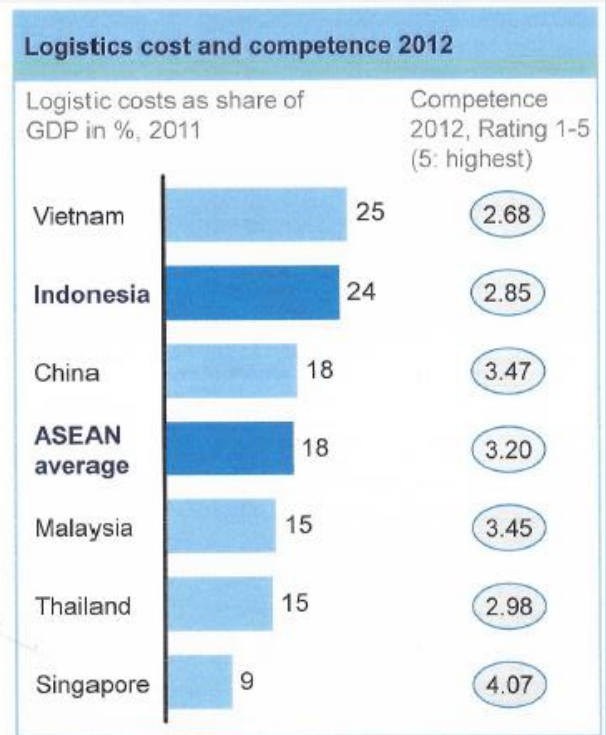
Logistic Cost yang Tinggi untuk Distribusi Barang ke Indonesia Timur



Lebih murah pengiriman barang dari Jakarta ke Hamburg (11.000 km) daripada dari Jakarta ke Padang (1.000 km)

Source: Quotes from domestic logistic company, 2012

Sumber: RJ Lino, 2014



Source: McKinsey Study

Masalah Kawasan Perbatasan

- **Keterisolasian kawasan perbatasan negara,**
 - Minimnya akses ke kawasan perbatasan karena minimnya APBN dan APBD untuk pembangunan kecamatan perbatasan yang lokasinya terpencil dan terluar.
- **Belum ada sistem** untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan baik industri maupun perdagangan berbasis potensi sumber daya kawasan perbatasan, serta menjamin pemberdayaan masyarakat perbatasan;
- **Adanya *overlapping claim areas*** segmen-segmen batas wilayah negara Indonesia dengan negara tetangga;
- **Masih lemahnya pengamanan batas wilayah laut, darat, dan udara** di kawasan perbatasan negara;
- **Kurang terintegrasinya pengelolaan dan pembangunan** kawasan perbatasan negara dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan.

Masalah Pos Perbatasan

- Pembangunan bidang pertahanan dan keamanan belum menyentuh seluruh wilayah perbatasan dan pulau terluar.
- Belum optimalnya pengamanan terhadap pulau kecil terluar di P. Berhala, P. Nipah, P. Laut, P. Enggano, P. Karimata, P. Serutu, P. Maratua, P. Derawan, P. Sebatik, P. Miangas, P. Marore, P. Marampit, P. Batek, P. Mangudu, P. Dana (Kep. Rote), P. Dana (Kep. Sabu), P. Lirang, P. Wetar, P. Kisar, P. Marotai, P. Fani, P. Bras, P. Rondo, P. Nasi, P. Bengkaru, dan P. Haloban.
- Perlu peningkatan pembangunan pos-pos pengamanan perbatasan dan gelar pasukan TNI secara terbatas di pulau-pulau kecil terluar dalam rangka menjamin kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.



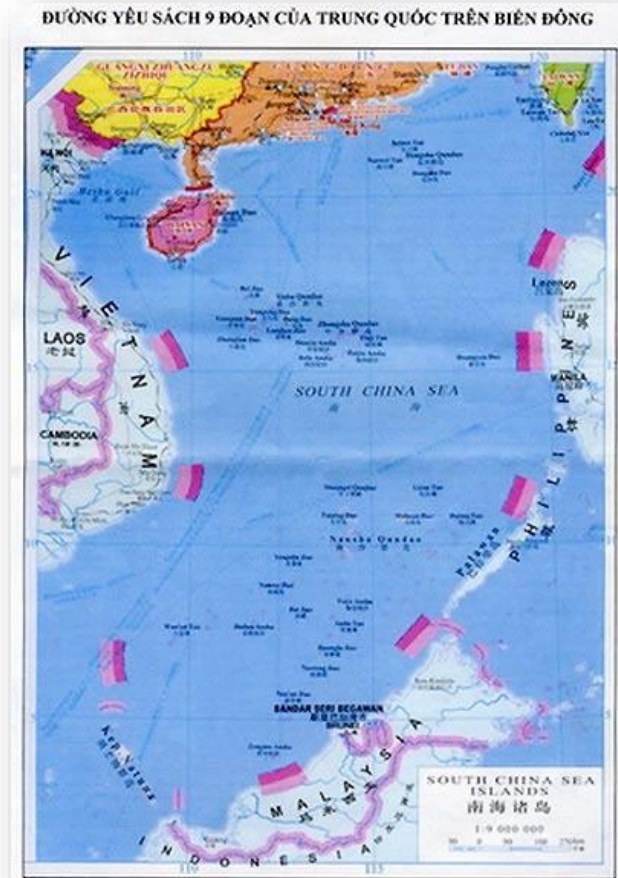
TANJUNG DATUK

Potensi Konflik Maritim

- Dalam perspektif geostrategis, perbatasan laut Indonesia memiliki peran penting bagi penguasaan dan pemanfaatan potensi laut, yaitu:
 - potensi sumber daya yang dapat diperbaharui,
 - potensi sumber daya tidak dapat diperbaharui,
 - potensi sumber energi, maupun
 - potensi strategis.
- Potensi-potensi yang dimiliki perbatasan laut inilah yang mengundang potensi konflik maritim.
- Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memang tidak terlibat secara langsung di dalam konflik Laut China Selatan, namun hal tersebut secara langsung dapat mempengaruhi geopolitik Indonesia.

Nine-Dotted Line

- Klaim teritorial China yang disebut "*nine-dotted line*", yaitu garis demarkasi yang digunakan China dan Taiwan untuk menunjuk klaim mereka di Laut China Selatan, menjangkau dan tumpang tindih dengan ZEE Indonesia di Laut Natuna.
- Dilihat dari segi hukum internasional, peta Laut China Selatan yang dibuat oleh Cina tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.
- *Nine-dotted line* telah diprotes tidak hanya oleh Indonesia, namun juga Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei.



Permasalahan Regulasi dan Institusi

- Permasalahan **regulasi** dan **institusi** menyebabkan belum optimalnya penanganan pelanggaran kelembagaan hukum di laut.
- **Secara regulasi**, pengelolaan laut belum dilaksanakan dalam satu koridor regulasi yang komprehensif dan konsisten. Pada saat ini ada 13 K/L penegak hukum di laut dengan kewenangan yang berbeda-beda.
 - Dari ke-13 K/L tersebut hanya TNI AL, Polri (Dit Polair), Kementerian Perhubungan (Ditjen Hubla), Kementerian Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP), Kementerian Keuangan (Ditjen Bea Cukai), dan Bakorkamla yang memiliki Satuan Tugas Patroli di laut dengan jumlah total kapal patroli sebanyak 923 kapal.
 - Jumlah ini cukup besar, namun pengoperasiannya masih berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan tupoksi masing-masing lembaga, kurang optimal karena permasalahan ego sektoral belum sepenuhnya terselesaikan.

Permasalahan Regulasi dan Institusi



- **Secara institusi**, revitalisasi BAKORKAMLA menjadi BAKAMLA perlu didukung sarana dan prasarana yang memadai, termasuk peningkatan kapasitas peralatan surveillence, agar permasalahan keselamatan dan keamanan di laut dapat diatasi secara optimal.

Sinergi Lintas Sektor



KOPERASI INDONESIA



Bagaimana Kerangka Kelembagaannya?



Kementerian PPN/
Bappenas



PENGAYOMAN
KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM RI



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

RISTEK



Sistem Manajemen Nasional (Sismennas)



Apa itu Sismennas?



Sismennas adalah

- Perpaduan tata nilai, struktur, fungsi, dan proses,
- Yang merupakan himpunan usaha untuk mencapai kehematan, daya guna dan hasil guna sebesar mungkin,
- Dalam menggunakan sumber daya dan dana nasional,
- Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.

Siklus Sismennas

Perumusan Kebijakan
(*Policy Formulation*)

1

Proses
Penyelenggaraannya
secara Serasi dan
Terpadu

2

Pelaksanaan
Kebijakan (*Policy
Implementation*)

3

Penilaian Hasil
Pelaksanaan
Kebijakan Nasional

Landasan Sismennas

Paradigma Nasional

1. **Pancasila**, sebagai landasan falsafati;
2. **UUD 1945** sebagai landasan konstitusional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
3. **Wawasan Nusantara** sebagai landasan visional yang mengandung nilai-nilai persatuan dan kesatuan wilayah, bangsa, dan negara;
4. **Ketahanan Nasional** sebagai landasan konsepsional dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan keamanan;
5. **Landasan operasional** yang dalam perjalanan sejarah NKRI berkembang sesuai dengan kepentingannya, yaitu:
 - Nawaksara saat kepemimpinan Presiden Soekarno,
 - GBHN saat kepemimpinan Presiden Suharto,
 - RPJPN 2005—2025,
 - RPJMN 2005—2009 dan RPJMN 2010—2014 saat kepemimpinan Presiden SBY.
 - RPJMN 2015—2019 saat kepemimpinan Presiden JKW.

Orientasi Sismennas

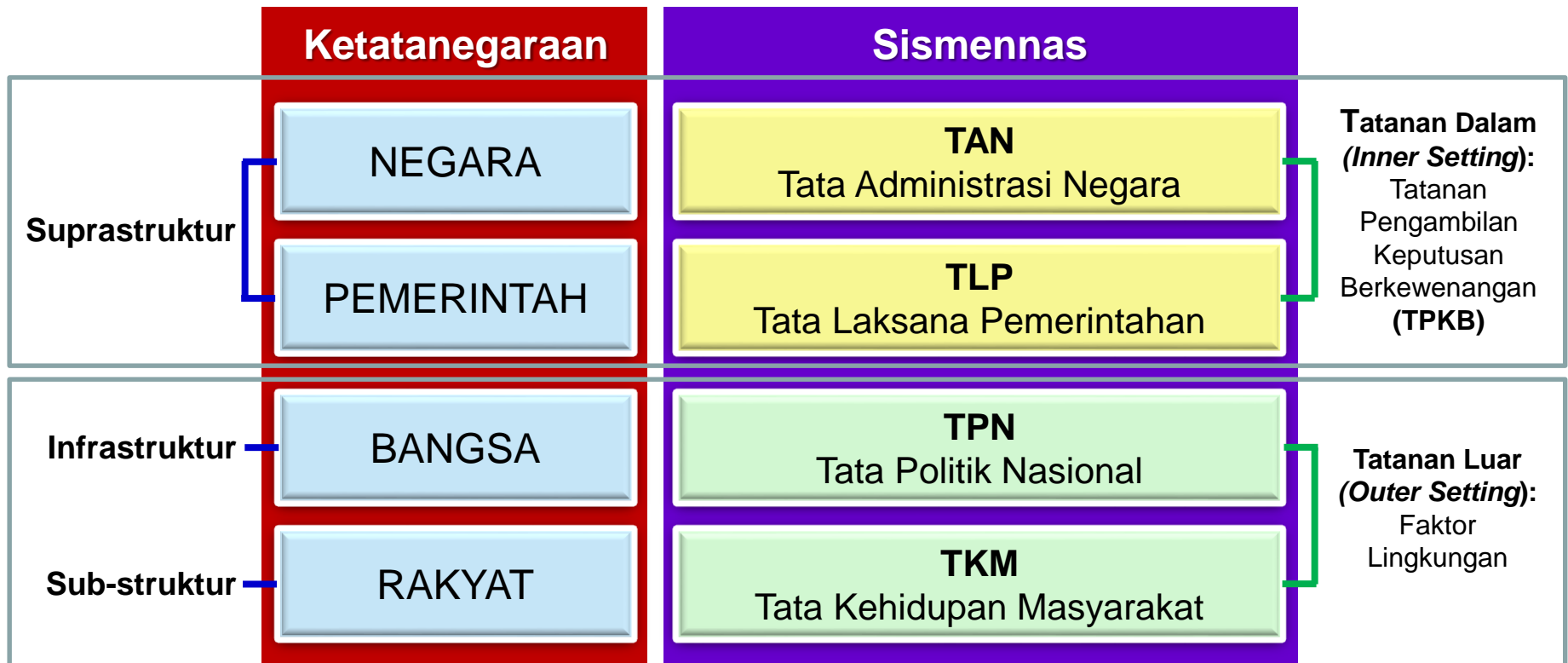


1. Mengembangkan wawasan strategik;
2. Membangun keterpaduan dan kerja sama:
 - antarlembaga,
 - antarbidang,
 - antarsektor,
 - antarwilayah, dan
 - antarpemerintah dengan masyarakat;
3. Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab (*Good Governance*);
4. Menerapkan metodologi dan teknik manajemen secara tepat guna.

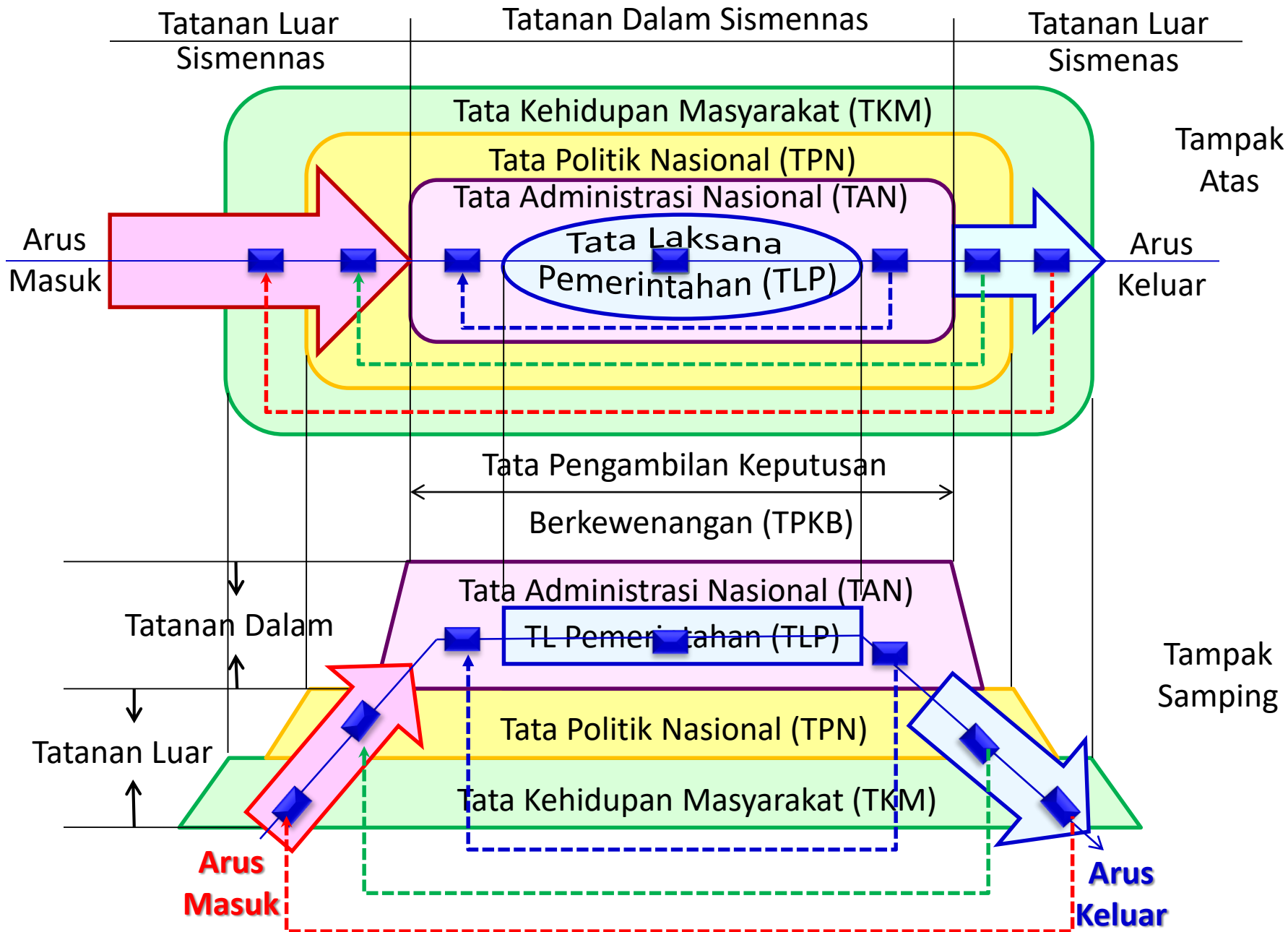
Konsep Dasar Sismennas

- **Sistem** adalah suatu totalitas yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berhubungan (interrelasi), saling keterpaduan (interaksi), saling ketergantungan (interdependensi) yang secara sinergi bersama-sama mengemban fungsi tertentu.
- **Manajemen** adalah pengelolaan atau tata laksana yang merupakan proses, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur **perencanaan**, pelaksanaan, pengendalian, dan penilaian atas setiap pemanfaatan sumber daya dan sumber dana secara hemat, efektif, dan efisien untuk mencapai tujuan yang tepat guna.
- **Nasional** adalah seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kehidupan bermasyarakat melingkupi berbagai aspek kehidupan dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terkandung makna bahwa setiap komponen bangsa sadar akan hak dan kewajiban juga berperan serta dalam membangun dan membela negara.

Tatanan Sismennas



Struktur Sismennas



Tata Pengambilan Keputusan Berkewenangan (TPKB)

- Mentransformasikan berbagai masukan yang bersifat politis (aspek kehidupan bangsa) ke dalam bentuk administratif (program dan kegiatan)
 1. **Perencanaan** dilaksanakan sebagai rintisan dan persiapan sebelum pelaksanaan sesuai dengan kebijakan yang dirumuskan.
 2. **Pengendalian** dilaksanakan sebagai arahan, bimbingan, dan koordinasi selama pelaksanaan.
 3. **Penilaian** dilaksanakan untuk membandingkan hasil pelaksanaan dengan keinginan setelah pelaksanaan selesai.
- Seluruh keputusan dan kebijakan dari tiga fungsi TPKB tersebut lebih lanjut secara strategis, manajerial, dan operasional dituangkan dalam berbagai hierarki perundang-undangan dan peraturan sesuai dengan kepentingan dan klasifikasinya serta dikeluarkan oleh instansi atau pejabat terkait yang diwenangkan.

Struktur RPJMN 2015-2019

VISI:

Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong

7 MISI

NAWACITA
9 Agenda Prioritas

TRISAKTI

Berdaulat dalam
Bidang Politik

- 12 Program Aksi
- 115 Prioritas Utama

Berdikari dalam
Bidang Ekonomi

- 16 Program Aksi

Berkepribadian dalam
Bidang Kebudayaan

- 3 Program Aksi

Misi Pembangunan

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, **menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim**, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan **memperkuat jati diri sebagai negara maritim**.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. **Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional**.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

9 Agenda Prioritas - NAWACITA

1. Menghadirkan Kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga Negara
2. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya
3. Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan
4. Memperkuat Kehadiran Negara dalam Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya
5. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat Indonesia
6. Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional
7. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-sektor Strategis Ekonomi Domestik
8. Melakukan Revolusi Karakter Bangsa
9. Memperteguh Kebhinekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia

Menuju Indonesia yang Jauh Lebih Baik

1. Mengejar peningkatan daya saing,
2. Meningkatkan kualitas manusia termasuk melalui pembangunan mental,
- 3. Memanfaatkan dan mengembalikan potensi yang hilang di sektor maritim dan kelautan,**
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan basis yang kuat dan berkualitas,
5. Mengurangi ketimpangan antarwilayah,
6. Memulihkan kerusakan lingkungan,
7. Memajukan kehidupan bermasyarakat.



Strategi Pembangunan Nasional

NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA

- 1) Membangun untuk manusia dan masyarakat;
- 2) Upaya peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar;
- 3) Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan.
- 4) Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem

3 DIMENSI PEMBANGUNAN

DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

Pendidikan

Kesehatan

Perumahan

Mental / Karakter

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

Kedaulatan Pangan

Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan

Kemaritiman dan Kelautan

Pariwisata dan Industri

DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN

Antarkelempok
Pendapatan

Antarwilayah:

- (1) Desa,
- (2) Pinggiran,
- (3) Luar Jawa,
- (4) Kawasan Timur

KONDISI PERLU

Kepastian dan
Penegakan Hukum

Keamanan dan
Ketertiban

Politik & Demokrasi

Tata Kelola & RB

QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA

Dimensi Pembangunan

- Koordinasi Perencanaan Multi-Sektor dan Multi K/L/D terhadap masing-masing **Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA)** meliputi:
 1. Kedaulatan Pangan
 2. Kedaulatan Energi
 - 3. Kemaritiman**
 4. Industri/Kawasan Industri
 5. Pariwisata
 6. Revolusi Mental
 7. Kawasan Perbatasan.



Kerangka Kelembagaan

**Sumber: Buku I RPJMN 2015-2019,
Bab 7 Kaidah Pelaksanaan**

Pengertian dan Ruang Lingkup

- **Kelembagaan** merujuk kepada organisasi, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi, serta SDM aparatur.
- **Organisasi** mencakup rumusan tugas, fungsi, kewenangan, peran, dan struktur.
- **Pengaturan hubungan** inter dan antar-organisasi mencakup aturan main dan/ atau tata hubungan kerja inter dan antar-organisasi/ lembaga pemerintah.
- **SDM aparatur** negara mencakup para pejabat negara dan aparatur sipil negara yang menjalankan organisasi tersebut.



Organisasi/Lembaga Pemerintah

1. Lembaga-lembaga negara, yang terdiri dari MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, KY, dan BPK sebagaimana diatur dalam UUD-NRI1945 dan peraturan-perundangan terkait;
2. Kementerian negara dan lembaga pemerintah non kementerian sebagaimana diatur di dalam UU 39/2008 tentang Kementerian Negara;
3. Lembaga Non Struktural yang dibentuk atas perintah undang-undang, seperti KPK, Ombudsman RI, Komnas HAM, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan lain-lain;
4. Pemerintah Daerah beserta satuan kerja perangkat daerah yang dibentuk sesuai dengan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan perundangan lainnya.

Di luar lembaga-lembaga tersebut, dalam rangka memperkuat dan memperlancar pelaksanaan pembangunan, Pemerintah dapat membentuk lembaga-lembaga yang memiliki fungsi koordinasi seperti: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN), Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN), dan lain-lain.

Tata Hubungan Kerja antar Lembaga Pemerintah

1. Diatur di dalam peraturan-perundangan tertentu. Misalnya:
 - a. Tata hubungan kerja antara KPK, Polri, dan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi diatur di dalam UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - b. Tata hubungan kerja antara Kementerian Keuangan, Kementerian PPN, dan K/L dalam perencanaan dan penganggaran diatur di dalam UU 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, beserta peraturan turunannya;

Tata Hubungan Kerja antar Lembaga Pemerintah

2. Diatur dalam bentuk pembentukan **Tim Koordinasi**,
 - seperti misalnya tata hubungan kerja pengelolaan reformasi birokrasi nasional antara:
 - Kantor Wakil Presiden,
 - Kementerian PAN dan RB,
 - Kementerian Keuangan,
 - Kementerian Dalam Negeri,
 - Kementerian PPN,
 - Sekretariat Negara,
 - Sekretariat Kabinet, dan lain-lain
 - dilakukan dengan pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN);

Tata Hubungan Kerja antar Lembaga Pemerintah

3. Diatur dalam bentuk penetapan **Nota Kesepahaman Bersama** (MoU) di antara beberapa lembaga pemerintah yang saling terkait untuk saling mendukung dalam melaksanakan program/kegiatan yang memiliki saling keterkaitan yang sangat erat.
 - Hal ini misalnya dilakukan oleh
 - Kementerian Perindustrian,
 - Kementerian Perdagangan, dan
 - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil
 - dalam mendorong penguatan Gerakan Nasional Gemar Produk Indonesia.

Aspek sumber daya manusia aparatur di dalam isu kerangka kelembagaan mencakup jumlah dan kualitas, yang meliputi pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills), dan sikap (attitude).

Sasaran

- Penguatan kerangka kelembagaan pemerintah dimaksudkan untuk mewujudkan kelembagaan pemerintah yang
 - efektif,
 - efisien,
 - akuntabel, dan
 - sinergis
- agar mampu melaksanakan program-program pembangunan dengan efektif dan efisien.



Arah Kebijakan dan Strategi

- Pelaksanaan program pembangunan pada umumnya akan memanfaatkan kelembagaan pemerintah yang sudah ada, seperti lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, dan lembaga non-struktural.
- **Apabila diperlukan, dapat dibentuk institusi koordinasi** untuk mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang bersifat lintas sektor, lintas K/L, dan/atau lintas daerah.



Upaya Penguatan Kelembagaan Pemerintah

1. Penguatan koordinasi antar instansi yang terkait dengan fungsi penataan kelembagaan instansi pemerintah, yang dikoordinasikan oleh kementerian yang membidangi pendayagunaan aparatur negara;
2. Penataan tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga pemerintah untuk menghindari multi-tafsir dan duplikasi fungsi, serta benturan kewenangan;
3. Penyederhanaan struktur baik secara horizontal maupun vertikal untuk mengurangi fragmentasi organisasi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
4. Penyempurnaan bisnis proses inter maupun antar lembaga agar tercipta tata laksana pemerintahan dan pembangunan yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif, dan efisien;
5. Penyediaan aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi lembaganya dengan baik;
6. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan program prioritas pembangunan

Penguatan kelembagaan pemerintah juga dilakukan dengan memperhatikan tiga hal:

1. **Kebijakan pembangunan**, yang meliputi sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan, untuk memastikan bahwa kelembagaan pemerintah yang diperkuat dan/atau dibentuk sejalan dan mendukung pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan akuntabel;
2. **Peraturan perundangan yang berlaku**, termasuk peraturan perundangan tentang desentralisasi dan otonomi daerah, untuk memastikan keserasian antara tugas, fungsi, dan kewenangan setiap lembaga dengan peraturan perundangan yang berlaku dan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah; dan
3. **Transparan, efektif, dan efisien**, untuk memastikan bahwa hasil penataan kelembagaan akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang akan dikeluarkan. Oleh karena itu, analisis biaya dan manfaat dalam penataan kelembagaan perlu dilakukan dengan cermat.

Prioritas Penguatan Kerangka Kelembagaan 2015-2019

Penguatan kerangka kelembagaan pemerintah difokuskan untuk mendukung pencapaian agenda prioritas pemerintah yang tertuang dalam NAWA CITA.



7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik,



e. Penguatan koordinasi dalam pembangunan kelautan guna meningkatkan keterpaduan dan efektivitas kebijakan pembangunan kelautan yang bersifat lintas sektor;



Arah Kebijakan dan Strategi Percepatan Pembangunan Kelautan

Sumber: Buku I RPJMN 2015-2019



Arah Kebijakan dan Strategi Percepatan Pembangunan Kelautan

1. Percepatan Pengembangan Ekonomi Kelautan
 - a. Inventarisasi dan Evaluasi Potensi Sumber Daya Kelautan,
 - b. Pengembangan Industri Kelautan,
 - c. Pengembangan Tol Laut dalam mendukung konektivitas dan sistem logistik,
 - d. Pengembangan Kawasan dan Potensi Baru.
2. Meningkatkan dan Mempertahankan Kualitas, Daya Dukung dan Kelestarian Fungsi Lingkungan Laut
3. Meningkatkan Wawasan dan Budaya Bahari, serta Penguatan Peran SDM dan Iptek Kelautan
 - a. Revitalisasi dan penguatan wawasan dan budaya bahari,
 - b. Peningkatan dan penguatan peran SDM dan Iptek di bidang kelautan.
4. Meningkatkan Harkat dan Taraf Hidup Nelayan dan Masyarakat Pesisir

1. Percepatan Pengembangan Ekonomi Kelautan

a. Inventarisasi dan Evaluasi Potensi Sumber Daya Kelautan

- i. Melakukan pengumpulan data dan informasi, antara lain data dasar geologi, geofisika, oseanografi, peta laut, lokasi potensi ikan, keanekaragaman potensi kekayaan biota laut, potensi sumber daya minyak, gas bumi dan mineral serta pelestarian lingkungan laut;
- ii. Mendorong penyelenggaraan survei, inventarisasi, dan evaluasi agar sejauh mungkin menggunakan kemampuan nasional dalam rangka penyediaan data hasil survei dan penelitian kelautan;

1. Percepatan Pengembangan Ekonomi Kelautan

a. Inventarisasi dan Evaluasi Potensi Sumber Daya Kelautan

- iii. Meningkatkan koordinasi antar-sektor, antarlembaga maupun antardisiplin ilmu yang didukung oleh tersedianya perangkat hukum yang dapat mengatur pemanfaatan data dan informasi sumber daya laut;
- iv. Mengembangkan sistem kelembagaan kelautan yang berfungsi mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan pemanfaatan sumber daya laut, dan mengamankan kepentingan nasional di laut serta mengkoordinasikan penyelesaian masalah penggunaan wilayah laut dan pesisir, dan mendorong terbentuknya jaringan sistem informasi geografis kelautan di berbagai lembaga kelautan pemerintah, baik perguruan tinggi, lembaga penelitian maupun swasta untuk digunakan bagi perencanaan pemanfaatan sumber daya laut.

1. Percepatan Pengembangan Ekonomi Kelautan

b. Pengembangan Industri Kelautan

- i. Identifikasi kekuatan ekonomi kelautan: Perhubungan laut, perikanan, wisata bahari, industri maritim, energi dan sumber daya mineral, bangunan laut dan jasa kelautan lainnya;
- ii. Mengembangkan industri kelautan secara bertahap dan terpadu melalui keterkaitan antarindustri dan antara sektor industri dengan sektor ekonomi lainnya, terutama dengan sektor ekonomi yang memasok bahan baku industri;
- iii. Mendorong iklim yang kondusif bagi penanaman modal untuk penyebaran pembangunan industri kelautan di berbagai daerah terutama di Kawasan Timur Indonesia (KTI), sesuai dengan potensi dan tata ruang nasional dan meningkatkan efisiensi sehingga mampu bersaing, baik di tingkat regional maupun global;

1. Percepatan Pengembangan Ekonomi Kelautan

b. Pengembangan Industri Kelautan

- iv. Mendorong peningkatan kapasitas, produksi industri galangan kapal dan industri pemecah kapal, baik melalui relokasi industri maupun investasi baru dan mengembangkan industri galangan kapal kayu dan fiber glass untuk menunjang pemenuhan kebutuhan armada pelayaran rakyat, perikanan, dan wisata;
- v. Menerapkan pola pengembangan ekonomi kelautan yang sesuai dengan prinsip desentralisasi dan pembagian kewenangan dan keunggulan wilayah, dengan menerapkan prinsip kelestarian dan kesesuaian dengan kondisi lokal;
- vi. Melakukan restorasi kawasan pesisir untuk pengembangan ekonomi wilayah.

1. Percepatan Pengembangan Ekonomi Kelautan

- c. **Pengembangan Tol Laut dalam mendukung konektivitas dan sistem logistik**
 - i. Mengembangkan sistem transportasi laut nasional untuk meningkatkan aksesibilitas dengan pusat-pusat pengembangan ekonomi regional dan nasional serta mengembangkan jalur lalu lintas antar samudera, seperti jalur Singapura-Biak dan Laut Cina Selatan-Australia, dan mengupayakan akses jalur lintas tersebut ke pelabuhan samudera lokal dan mengembangkan jalur pelayaran antarpulau besar dan jalur penyeberangan antarpulau yang berdekatan;
 - ii. Meningkatkan kapasitas daya tampung pelabuhan, pergudangan, dan lapangan penumpukan serta meningkatkan mutu pelayanan jasa kepelabuhan-an;

1. Percepatan Pengembangan Ekonomi Kelautan

- c. Pengembangan Tol Laut dalam mendukung konektivitas dan sistem logistik**
- iii. Meningkatkan keselamatan pelayaran melalui peningkatan pelayanan navigasi dan peningkatan kegiatan pemetaan laut di lokasi yang padat lalu lintas pelayarannya;
 - iv. Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas domestik, melalui:
Pembangunan pelabuhan perintis dan prasarana pendukungnya dalam kerangka penguatan konektivitas dengan media laut;
Penambahan armada dan moda transportasi perintis di wilayah-wilayah remote dan potensial; dan Penambahan rute dan frekuensi transportasi perintis;
 - v. Mendorong peningkatan kapasitas, produksi industri galangan kapal dan industri pemecah kapal, baik melalui relokasi industri maupun investasi baru dan mengembangkan industri galangan kapal kayu dan fiber glass untuk menunjang pemenuhan kebutuhan armada pelayaran rakyat, perikanan, dan wisata.

1. Percepatan Pengembangan Ekonomi Kelautan

d. Pengembangan Kawasan dan Potensi Baru

- i. Mengembangkan potensi kawasan yang cepat tumbuh dan dapat mempercepat pembangunan ekonomi, seperti kegiatan lintas batas dan segitiga pertumbuhan dengan negara tetangga khususnya di KTI;
- ii. Penetapan zona industri dan aglomerasi industri perikanan dalam kawasan pertumbuhan ekonomi;
- iii. Mewujudkan pola pengembangan industri kelautan melalui kebijaksanaan wilayah terpadu dan kebijaksanaan komoditas terpadu yang mengacu pada kebijaksanaan pengembangan aglomerasi industri dan zona industri;
- iv. Meningkatkan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi cekungan minyak dengan memperhatikan batas-batas eksploitasi sesuai potensi lestari.

2. Meningkatkan & Mempertahankan Kualitas, Daya Dukung dan Kelestarian Fungsi Lingkungan Laut

- a. Penguatan koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan, serta penguatan kelembagaan pengelolaan kawasan konservasi;
- b. Penguatan dan pengembangan kerjasama regional maupun internasional dalam pengelolaan wilayah laut;
- c. Rehabilitasi kawasan pesisir yang rusak dan pengendalian bencana alam dan dampak perubahan iklim melalui penana-man vegetasi pantai termasuk mangrove, pengembangan kawasan pesisir yang meningkat ketahanannya terhadap dampak bencana dan perubahan iklim, pengembangan sabuk pantai, serta pengurangan pencemaran wilayah pesisir dan laut;
- d. Peningkatan upaya pembinaan, pengawasan, dan penegakan peraturan sebagai produk perangkat hukum di lapangan terkait pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan, pencemaran dan kegiatan yang merusak lainnya;
- e. Pengkajian untuk mengembangkan alternatif cara pemanfaatan potensi laut yang lebih akrab lingkungan.

3. Meningkatkan Wawasan dan Budaya Bahari, serta Penguatan Peran SDM dan IPTEK Kelautan

a. Revitalisasi dan penguatan wawasan dan budaya bahari

- i. Pendidikan dan penyadaran masyarakat tentang kelautan yang diwujudkan di semua jalur pendidikan;
- ii. Melestarikan nilai budaya, wawasan bahari serta revitalisasi hukum adat dan kearifan lokal terkait dengan tata kelola sumberdaya kelautan;
- iii. Melindungi dan merevitalisasi peninggalan budaya bawah laut.

b. Peningkatan dan penguatan peran SDM dan IPTEK di bidang kelautan

- i. Mendorong jasa pendidikan dan pelatihan yang berkualitas di bidang kelautan yang diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja sesuai dengan permintaan dan kebutuhan yang ada;
- ii. Pengembangan standar kompetensi sumber daya manusia di bidang kelautan;
- iii. Peningkatan dan penguatan peran iptek, riset dan sistem informasi kelautan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan kelautan yang berkelanjutan.

4. Meningkatkan Harkat dan Taraf Hidup Nelayan dan Masyarakat Pesisir

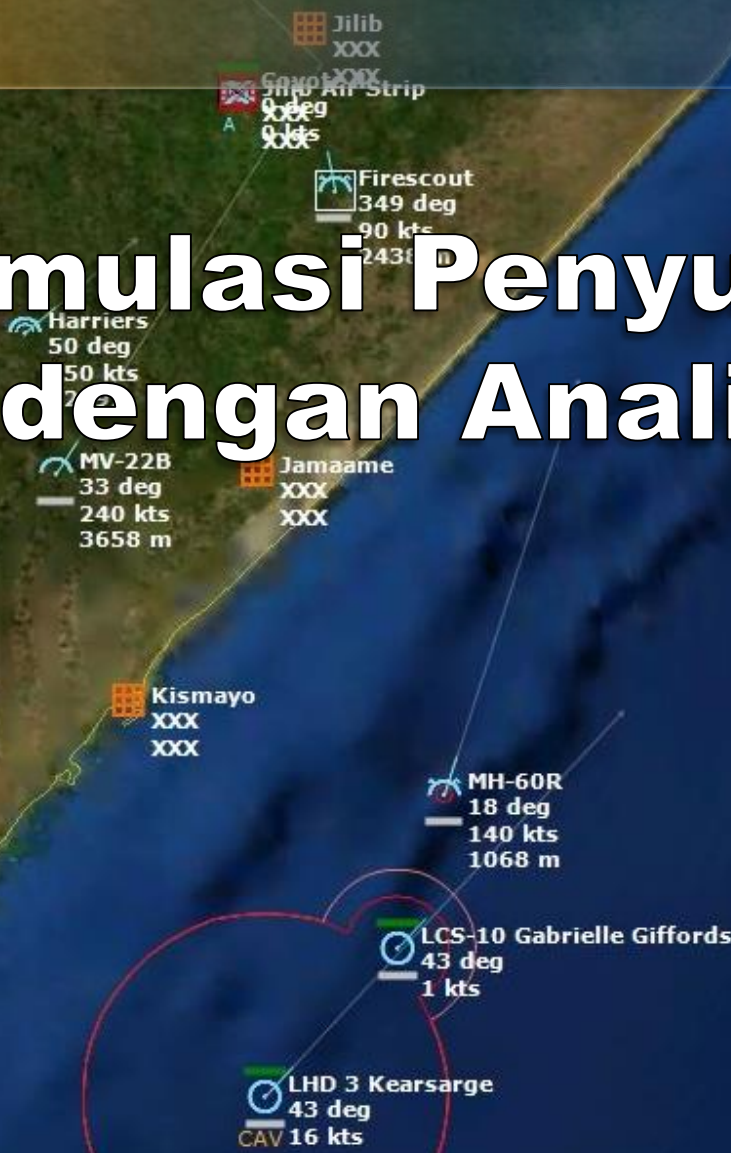
- a. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha nelayan skala kecil, pembudidayaan ikan tradisional, dan petambak garam
 - i. Penyediaan sumber pembiayaan yang murah, mudah, dan aksesibel untuk pengembangan usaha kelautan dan perikanan;
 - ii. Pembentukan sistem dan kelembagaan penjamin pelaku dan usaha perikanan;
 - iii. Pengembangan fasilitasi kredit usaha kelautan dan perikanan, serta pengembangan asuransi nelayan;
 - iv. Fasilitasi sertifikasi tanah nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam;
- b. Peningkatan kapasitas industri kecil pengolahan hasil laut serta mengembangkan sentra produksi dalam upaya meningkatkan produktivitas usaha perikanan;

4. Meningkatkan Harkat dan Taraf Hidup Nelayan dan Masyarakat Pesisir

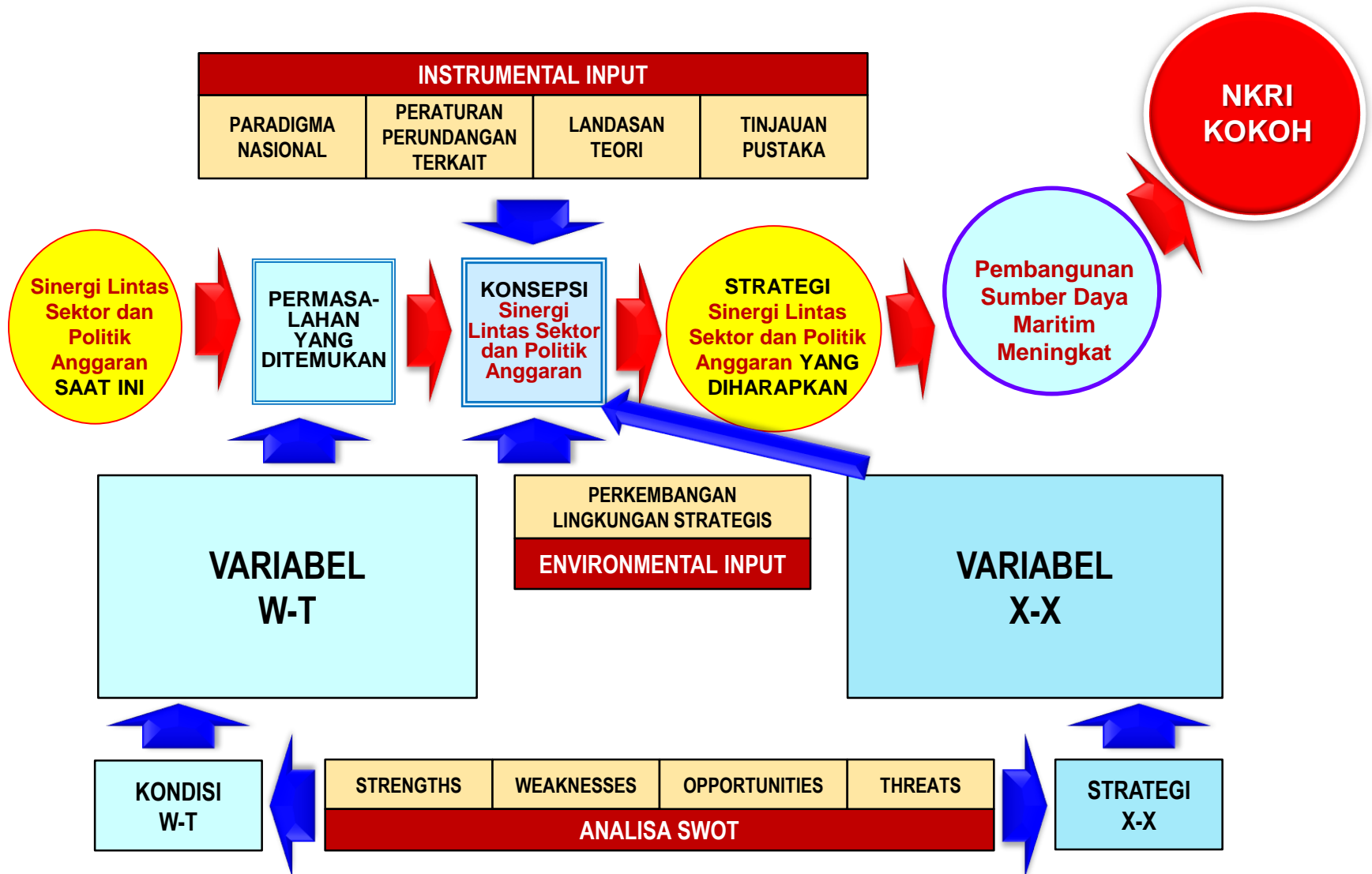
- c. Penyempurnaan pola kemitraan yang lebih berkeadilan dan saling menguntungkan serta mengembangkan sistem bagi hasil yang berkeadilan bagi para pelaku usaha perikanan tangkap;
- d. Peningkatan kesejahteraan dan kemampuan masyarakat desa pantai (pesisir) melalui pemantapan organisasi dan pemerintahan desa pantai, pengembangan prasarana sosial untuk menggerakkan kehidupan ekonomi, dan mata pencarian alternatif di musim paceklik.
- e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau kecil, terutama pulau terluar dengan memenuhi kebutuhan infastruktur dasar, seperti listrik, komunikasi, dan air minum serta pengembangan sumber pendapatan ekonomi lokal.
- f. Penguatan peran serta masyarakat pesisir dan kelangsungan hak masyarakat adat dan tradisional dalam menjaga kelestarian dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Simulasi Penyusunan KSU dengan Analisa SWOT

°43'56" - Depth: 0m - Slope: 0%
1 AM (Night)
sky - No rain - 5°C - Wind/Sea: 0



ALUR PIKIR Sinergi Lintas Sektor dan Politik Anggaran dalam Mendukung Pembangunan Sumber Daya Maritim

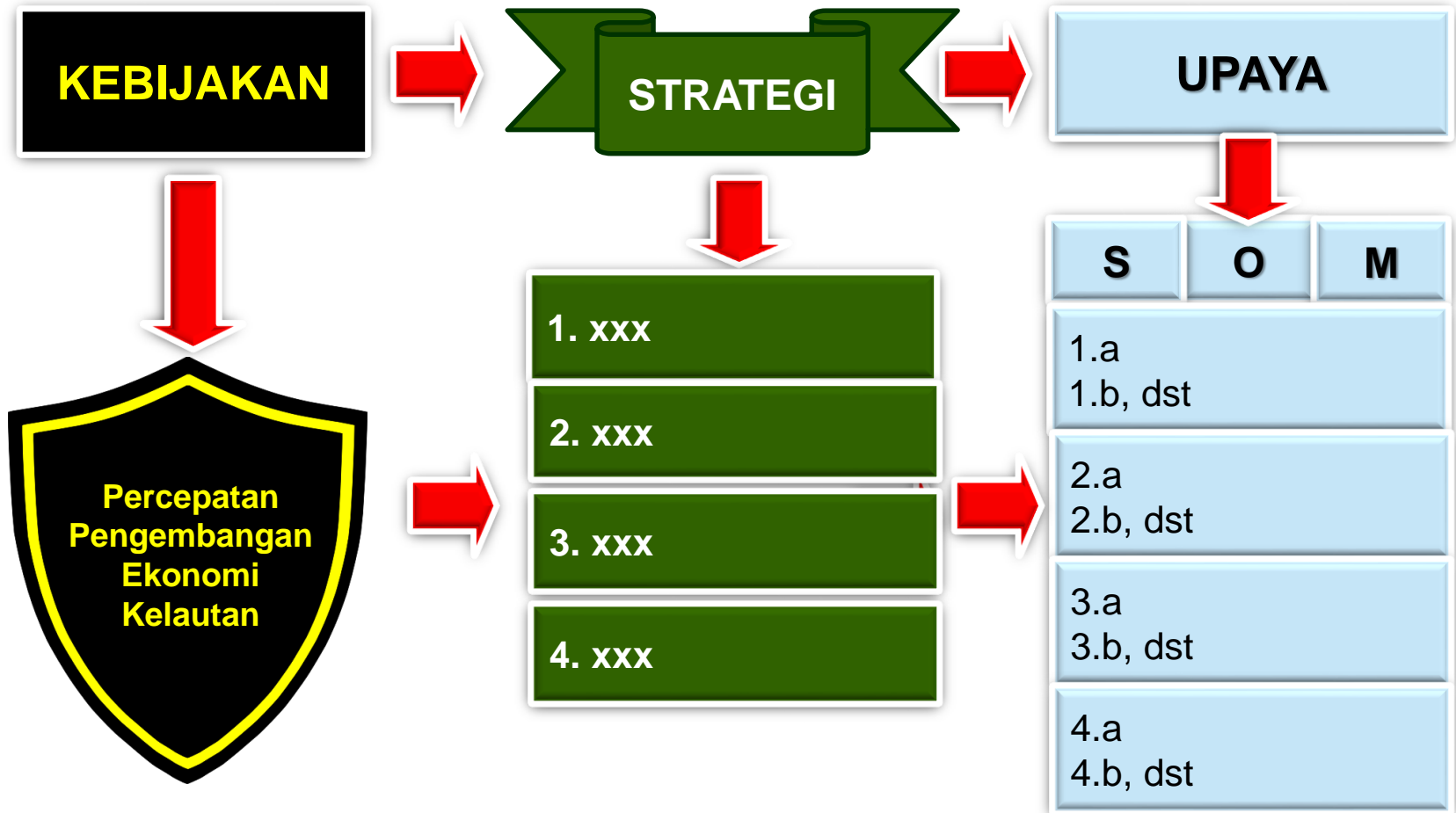


Analisis SWOT

**PERMASALAHAN
YANG DITEMUKAN
(W-T)**

**KONSEPSI
Sinergi Lintas
Sektor dan Politik
Anggaran
(X-X)**

**STRATEGI
Sinergi Lintas Sektor
dan Politik Anggaran
YANG DIHARAPKAN**



Analisis SWOT

INTERNAL	Strengths (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)
EKSTERNAL	Strategi SO Gunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Strategi WO Atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang
Opportunities (Peluang)	Strategi ST Gunakan kekuatan untuk menghindari atau mengatasi ancaman	Strategi WT Minimalkan kelemahan dan hindari ancaman
Threats (Ancaman)		

Identifikasi Faktor Internal

**Strengths
(Kekuatan)**



Faktor Internal
yang
mendukung

**Weaknesses
(Kelemahan)**



Faktor Internal
yang tidak
mendukung

Koordinasi Lintas Sektoral dalam
Mendukung Pembangunan
Kemaritiman

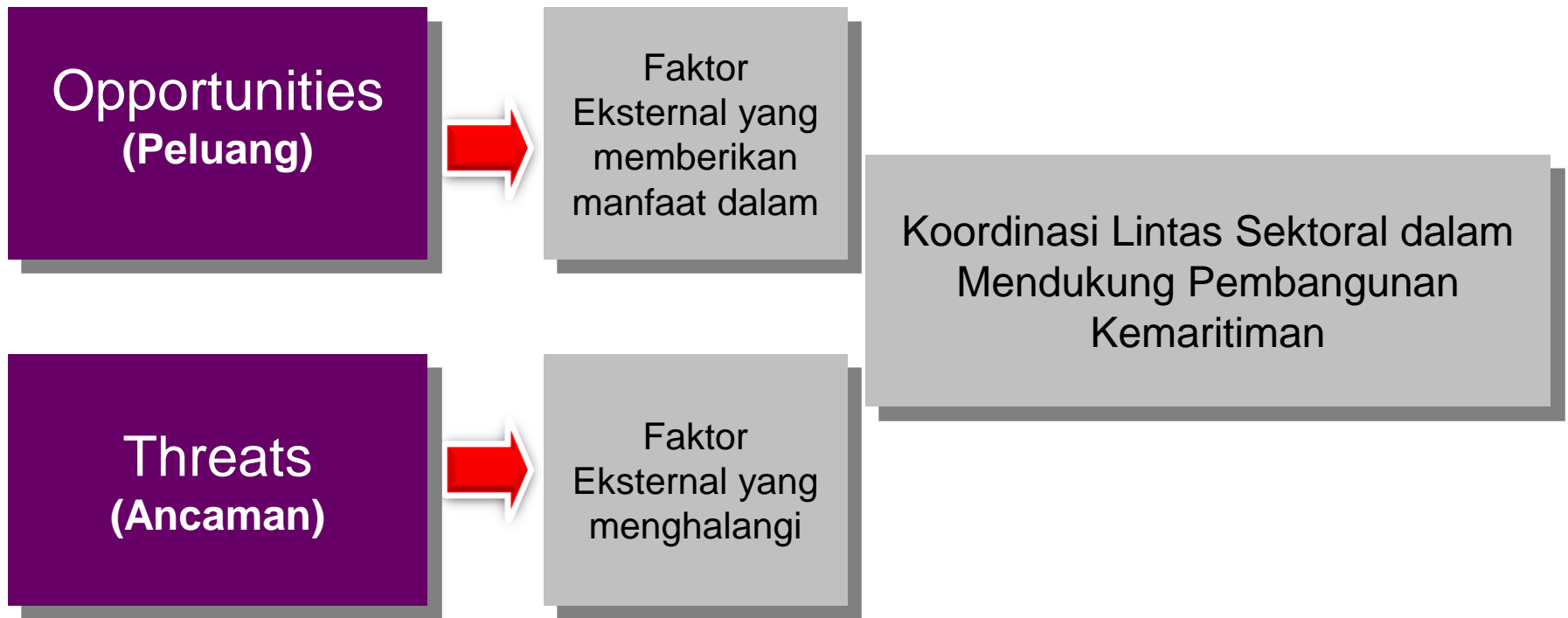
Strengths (Kekuatan)

No	Strength (Kekuatan)	NU	BF	NUxBF
1	Adanya Kementerian Maritim	2	12	24
2	Sumberdaya Kelautan yang melimpah	5	40	200
3	Posisi Strategis Indonesia	4	25	100
4	Pasar domestik yang besar	3	15	45
5	Adanya regulasi	1	8	8
	Jumlah		100	377

Weaknesses (Kelemahan)

No	Weaknesses (Kelemahan)	NU	BF	NUxBF
1	Adanya ego sektoral	2	10	20
2	Penegakan hukum lemah, tumpang tindih, KKN	4	30	120
3	Birokrasi dan perizinan	1	5	5
4	Infrastruktur minim, teknologi terbatas, anggaran terbatas	3	15	45
5	Kualitas SDM rendah	5	40	200
	Jumlah		100	390

Identifikasi Faktor Eksternal



Opportunities (Peluang)

No	Opportunities (Peluang)	NU	BF	NUxBF
1	Adanya pasar bebas, investasi	3	20	60
2	Adanya kebutuhan negara lain	4	25	100
3	Adanya kerjasama, hubungan diplomatik, adanya hukum Internasional	5	30	150
4	Adanya teknologi baru	2	15	30
5	Adanya skema pembiayaan Internasional	1	10	10
	Jumlah		100	350

Threats (Ancaman)

No	Threats (Ancaman)	NU	BF	NUxBF
1	Maraknya IUU	5	35	175
2	Adanya embargo	1	5	5
3	Ancaman saingan industri ikan negara tetangga	4	25	100
4	Gangguan keamanan internasional	3	20	60
5	Pencemaran ekosistem laut	2	15	30
	Jumlah		100	370

Permasalahan yang Ditemukan: Kondisi WT

Weaknesses

1. Adanya ego sektoral
2. Penegakan hukum lemah, tumpang tindih, KKN
3. Birokrasi dan perizinan
4. Infrastruktur minim, teknologi terbatas, anggaran terbatas
5. Kualitas SDM rendah

Threats

1. Maraknya IUU
2. Adanya embargo
3. Ancaman saingan industri ikan negara tetangga
4. Gangguan keamanan internasional
5. Pencemaran ekosistem laut

Strategi Apa sebagai Konsepsi Koordinasi Lintas Sektoral?

- 1. Strategi SO** Gunakan Kekuatan untuk memanfaatkan Peluang
- 2. Strategi WO** Atasi Kelemahan dengan memanfaatkan Peluang
- 3. Strategi ST** Gunakan Kekuatan untuk menghindari atau mengatasi Ancaman
- 4. Strategi WT** Minimalkan Kelemahan dan hindari Ancaman

Kesimpulan: Strategi Terpilih W-T

Weaknesses

1. Adanya ego sektoral
2. Penegakan hukum lemah, tumpang tindih, KKN
3. Birokrasi dan perizinan
4. Infrastruktur minim, teknologi terbatas, anggaran terbatas
5. Kualitas SDM rendah

Threats

1. Maraknya IUU
2. Adanya embargo
3. Ancaman saingan industri ikan negara tetangga
4. Gangguan keamanan internasional
5. Pencemaran ekosistem laut

Terima Kasih

